



## POSITIF COVID-19 DI YOGYA NAMBAH 478 KASUS

# Karantina Wilayah Sulit Diterapkan Meski Corona Melonjak Terus

YOGYA (MERAPI) - Terpaparnya Bupati Sleman, Sri Purnomo menjadi peringatan bahwa kondisi Covid-19 di Yogyakarta kian masif. Padahal Sri Purnomo telah menerapkan protokol kesehatan ketat dan bahkan sempat divaksinasi Covid-19. Di sisi lain, penambahan pasien corona di Yogya masih sangat tinggi. "Ini menjadi perhatian kita semua, warga DIY. Sekarang Covid-19 itu nyata dan ada di mana-mana. Buktinya Bupati Sri Purnomo saja kena, padahal sudah melaksanakan protokol kesehatan (prokes) ketat," ujar wakil ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana, Jumat (22/1).

Menurut Huda, perlu ada langkah serius mengendalikan kasus corona di Yogya. Meski demikian, dia menolak usulan karantina wilayah karena dinilai akan mempersulit ruang gerak. Ditambah tidak ada anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

apabila diberlakukan karantina.

"Saya tidak sependapat pemberlakuan karantina wilayah, realistis saja, kita tidak memiliki anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat itu diberlakukan," jelasnya.

Huda menyebut selama enam bulan pertama masa pandemi saja, Pemda DIY telah menyiapkan anggaran dari skema Bantuan Tak Terduga (BTT) sebesar Rp 600 miliar, namun untuk tiga bulan pertama memenuhi jatah hidup (Jadup) sebanyak 150 ribuan warga anggaran sudah tersekap sebesar Rp 400 miliar.

Sedangkan 2021, anggaran BTT untuk penanganan bencana di angka Rp 66 miliar. Menurutnya harus ditambah, mengingat saat ditetapkan BTT 2021, jumlah kasus harian Covid-19 masih di bawah 50 pasien. Namun beberapa hari ini, sudah menembus

*\* Bersambung ke halaman 9*



Huda Tri Yudiana mengingatkan kasus corona di Yogya makin masif.

### Karantina...

lebih 450 pasien per hari.

Sementara itu, Pemda DIY kembali mengumumkan lonjakan kasus positif Covid-19, Jumat (22/1) sebanyak 478 kasus, sehingga total kasus terkonfirmasi menjadi 18.736 kasus.

Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman mendominasi kasus dengan jumlah masing-masing 119 kasus positif, disusul Kabupaten Bantul sebanyak 97 kasus, Kabupaten Gunungkidul sebanyak 77 kasus dan 66 kasus lainnya dari Kabupaten Kulonprogo.

"Rincian kasus terdiri dari 103 kasus periksa mandiri, 299 kasus hasil tracing kasus sebelumnya, 4 kasus hasil screening karyawan kesehatan, 1 kasus pelaku perjalanan, dan 71 kasus belum ada info," jelas Juru Bicara Pemda DIY untuk penanganan Covid-19, Berty Murtiningsih.

Sementara, penambahan kasus semah sebanyak 974 kasus, sehingga total sembuh menjadi 12.427 kasus terdiri

dari 100 warga Kota Yogyakarta, 49 warga Bantul, 2 warga Kulonprogo, 3 warga Gunungkidul, dan 220 warga Sleman.

Adapun 5 kasus meninggal sehingga total kasus meninggal menjadi 422 kasus. Rincian kasus meninggal terdiri dari kasus 13.163, Laki-laki usia 65 tahun warga Sleman, kasus 16.979 perempuan usia 65 tahun warga Bantul, kasus 17.102 laki-laki usia 52 tahun warga Kota Yogyakarta, kasus 17.870 perempuan usia 58 tahun warga Bantul, dan kasus 18.586 perempuan usia 73 tahun Bantul.

Sementara itu Pemerintah Kota Yogyakarta akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sampai 8 Februari 2021. Namun untuk tindak lanjut hal itu di daerah, masih menunggu kebijakan tertulis dari pemerintah pusat dan Pemda DIY.

"Dalam hal PTKM atau PPKM skala nasional, kami pasti mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang sudah menyampaikan perpanjangan selama dua minggu. Pak Gubernur mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Otomatis Pemerintah Kota juga akan mengikuti kebijakan itu," kata Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi, Jumat (22/1).

Menurutnya PPKM menyangkut kebijakan yang sifatnya serentak, sehingga suatu kawasan atau wilayah harus mengikuti secara Bersama dengan tata aturan yang sama. Dengan diterapkan serentak, efektivitas kebijakan itu akan berdampak. Terutama harapan untuk mengurangi kasus Covid-19.

Dia menyatakan, melihat posisi Kota Yogyakarta di tengah-tengah di DIY, menjadi pusat aktivitas berbagai warga di sekitar DIY pada siang hari. Sedangkan jumlah kasus Covid-19 di daerah tetangga di Kota Yogyakarta

masih meningkat.

"Ini maknanya menjadi pertimbangan kami dalam satu kawasan harus memiliki kebijakan yang sama. Apalagi untuk DIY, pusat aktivitasnya ada di Kota Yogya, sehingga harus mengikuti itu," paparnya.

Untuk menindaklanjuti perpanjangan PPKM, pihaknya menunggu kebijakan tertulis dari pemerintah pusat dan Pemda DIY. Misalnya terkait teknis jam operasional usaha selama PPKM dalam penerapannya di Kota Yogyakarta akan dikaji dahulu. Dia menyebut, pernyataan pemerintah pusat akan mengubah jam tutup usaha selama PPKM menjadi pukul 20.00 WIB.

"Mau nggak mau kita harus mengikuti. Tetapi semuanya akan kami kaji bareng-bareng. Kami berharap seluruh kebijakan yang ada dijalankan di DIY dengan pola yang sama dalam mengatasi sebaran Covid-19," tambah Heroe. Meski demikian, pihaknya juga mem-

perhatikan kondisi yang berkembang di tiap daerah sehingga upaya untuk menekan sebaran Covid-19, juga memberikan kesempatan bagi masyarakat beraktivitas. Dicontohkan dengan mengurangi jam operasional usaha selama PPKM atau PTKM dari pukul 19.00 WIB menjadi pukul 20.00 WIB.

"Itu sebenarnya kelonggaran yang disiapkan, tetapi harus efektif untuk pelaksanaannya supaya semuanya bisa menjalankan secara bersama-sama. Baik Kota Yogya maupun kabupaten lain di DIY," tuturnya.

Dia juga mencontohkan dalam penerapan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM), pada pengaturan jumlah pekerja di perkantoran dengan sistem bekerja dari rumah di Kota Yogyakarta dan DIY awalnya 50 persen. Tapi pemerintah pusat meminta daerah untuk mengubah dan mengevaluasinya agar disesuaikan dengan pusat menjadi 75 persen. (C-4/Tri)-d

| Instansi           | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|--------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Kesehatan | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 17 September 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005